

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SI PRAJAWAN (Sistem Informasi Praja Wibawa Balangan) Satpol PP Balangan

1.2. Dibuat Oleh

Pemerintah Kabupaten Balangan dengan SKPD berasal dari Satpol PP Balangan pengusung Inovasi yaitu melalui dukungan anggaran SKPD.

1.3. Tahapan Inovasi

Inovator merancang ide untuk pengembangan program inovasi pada SKPD Satpol PP Balangan pada Tahun 2022. Melaksanakan tahapan uji coba/trial error, melaksanakan Implementasi secara aktif dengan terus melakukan pembenahan pada sistem informasi berbasis web dan android.

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Inisiator inovasi berasal dari ASN Satpol PP Balangan yang melaksanakan tugas fungsi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian (Mustafa Fahmi, S. Kom)

1.5. Jenis Inovasi

Bentuk inovasi SI-PRAJAWAN adalah program digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Bentuk SI-PRAJAWAN adalah Inovasi Tata Kelola

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Penegakan Peraturan Perundangan Daerah serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

Latar Belakang & Kondisi SEBELUM Inovasi

Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasannya pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasannya ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan memiliki anggota sejumlah 262 (Dua ratus enam puluh dua) personil terdiri dari 222 (Dua ratus dua puluh dua) pegawai tidak tetap (non ASN) dan 40 (Empat puluh) pegawai tetap (ASN). Dengan jumlah tersebut tentunya membutuhkan manajemen sumber daya manusia (SDM) baik itu data dan sistem pelaporan yang baik. SI-Prajawan menjadi solusi dalam hal tersebut untuk manajemen SDM dan sistem pelaporan kegiatan yang bersifat offline dirubah menjadi online dan menggunakan aplikasi web dan android.

Permasalahan / kendala

1. *Belum adanya aplikasi manajemen SDM untuk Satpol PP Balangan.*
2. *Belum ada pemetaan anggota Satpol PP yang berdasarkan pada lokasi tempat tinggal*
3. *Pelaporan kegiatan anggota yang diisi secara manual oleh anggota.*

Strategi yang ditawarkan melalui inovasi

Penggunaan aplikasi web dan android SI-PRAJAWAN :

1. *Tersedianya manajemen data Satpol PP Balangan yang baik*
2. *Menggunakan sistem filter wilayah menjadikan kemudahan bagi pengambil kebijakan memetakan jumlah anggota di setiap wilayah*
3. *Menggunakan aplikasi web dan android*
4. *Penginputan laporan kegiatan anggota Satpol PP Balangan lebih mudah hanya dengan genggaman.*
5. *Data dukung administratif bisa disajikan kepada pimpinan lebih terorganisir*

Landasan hukum

Payung hukum yang menaungi pelaksanaan inovasi :

1. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*
3. *Peraturan Bupati Balangan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.*
4. *Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah*
5. *Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 188.45/053 /SK/SATPOL.PP/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Sistem Informasi Praja Wibawa Balangan (SI-PRAJAWAN) Satpol PP Balangan Tahun 2022.*

Cara kerja atau operasionalisasi inovasi

Strategi penerapan SI-PRAJAWAN yaitu dengan menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang cukup mudah yaitu sebagai berikut :

1. *Admin meinput seluruh data anggota Satpol PP Balangan kedalam web base SI-PRAJAWAN.*
2. *Admin membuat beberapa akun guest untuk beberapa anggota*
3. *Komandan Peleton, Komandan Regu, PPNS dan anggota akan diberikan akun guest untuk bisa menggunakan aplikasi android yang memiliki akses yang berbeda-beda.*
4. *Pengambil kebijakan diberikan akses super admin untuk dapat*
5. *Anggota Satpol PP bisa mengakses SI-PRAJAWAN dan bisa membuat laporan kegiatan secara online.*
6. *Laporan selesai dan bisa ditujukan ke pimpinan*

Perubahan yang telah dicapai/dihasilkan (Kondisi SESUDAH inovasi)

Perubahan yang sangat signifikan yaitu tersedianya sistem manajemen data terpadu dan sistem pelaporan kegiatan yang baik untuk anggota Satpol PP Balangan.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi SI-PRAJAWAN yaitu :

Tersedia manajemen data dan sistem pelaporan bagi anggota Satpol PP Balangan.

1.10. Manfaat yang Diperoleh

1. *Tersedianya data yang akurat untuk anggota Satpol PP Balangan.*
2. *Meningkatkan kapasitas SDM Administrator program pada Satpol PP Balangan tentang penggunaan teknologi informasi*
3. *Meningkatkan pelayanan SKPD Satpol PP Balangan kepada masyarakat terkait pelanggaran Perda/Perkada serta gangguan Kamtibmas.*
4. *Tersedianya sistem pelaporan kegiatan yang baik untuk anggota Satpol PP Balangan.*
5. *Pemangu kebijakan bisa memtekankan per wilayah anggota Satpol PP Balangan.*
6. *SKPD Satpol PP Balangan dalam hal ini bisa memberikan kontribusi guna peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.*

1.11. Hasil Inovasi

Hasil inovasi yaitu tersedianya sistem informasi berbasis web dan android untuk manajemen data dan sistem pelaporan kegiatan anggota Satpol PP Balangan yang dinamakan Sistem Informasi Praja Wibawa Balangan (SI-PRAJAWAN)

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

Ujicoba program SI-PRAJAWAN dilaksanakan selama 1 s.d 4 Bulan yaitu pada tahun 2022 mengacu kepada teknis template web dan android.

1.13. Waktu Implementasi

Implementasi secara menyeluruh atau aktifasi program SI-PRAJAWAN yaitu tahun 2022 sehingga waktu usulan inovasi sesuai milestone yang diharapkan sebagai wujud inovasi SKPD dalam mendukung penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan tercapai.

1.14. Anggaran

Dukungan anggaran bersumber dari RKA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2022 dan tahun berjalan.

1.15. Profil Bisnis

Profil bisnis untuk program inovasi SI-PRAJAWAN tidak dibuat.

1.16. Kematangan

Skor kematangan inovasi SI PRAJAWAN belum cukup matang, dikarenakan inovasi ini akan diajukan untuk tahun 2024 dan hasil input pada aplikasi Sinovda Kabupaten Balangan Bappeda Litbang Kabupaten Balangan mendapat point nilai 39.